



LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

TRIWULAN III / 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

PENGAMBENGAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Jembrana, 15 Oktober 2023

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambengan



Andi Mannoengi

Disusun oleh :

Ketua Tim
Kepala Sub Bagian Umum



Lukman Hadi

KATA PENGANTAR

Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKT Tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2023 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan Tahun 2024 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan III Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan pada Tahun 2023.

Jemberana, 15 Oktober 2023

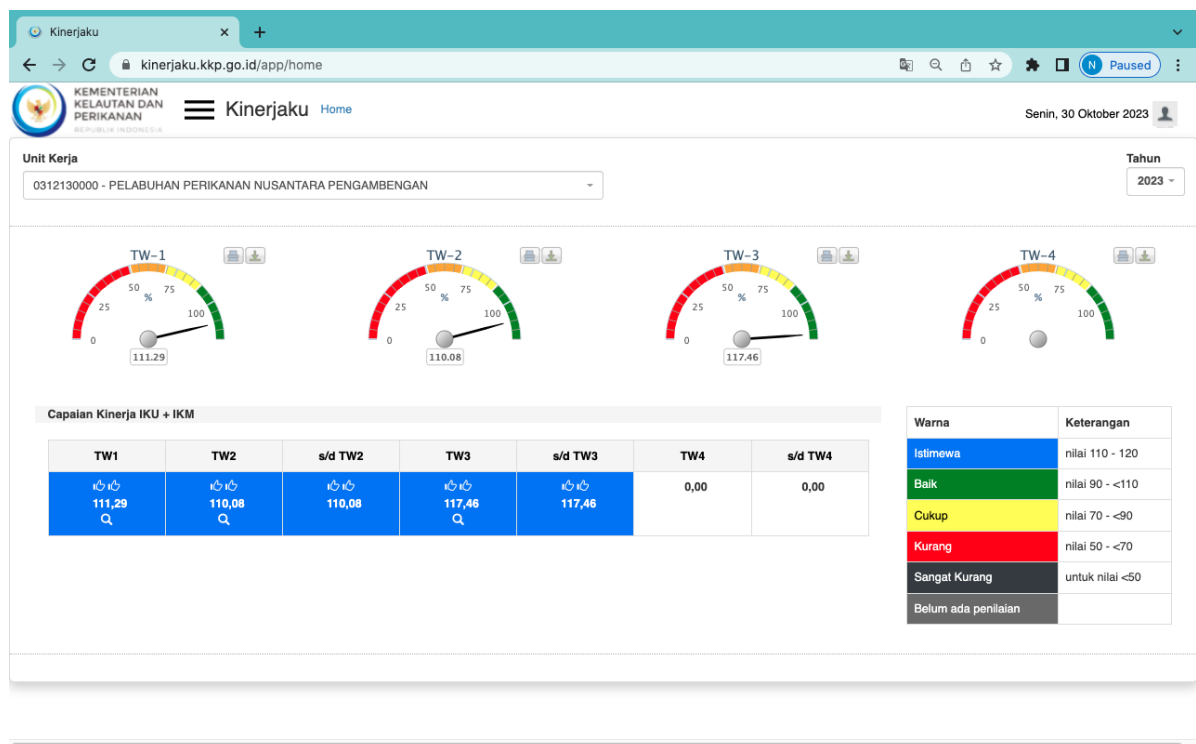
Kepala Pelabuhan



Andi Mannnojengi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan III Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp. 12.746.939.387,- yang terealisasi sebesar Rp 11.910.036.408,- atau 93,43% dari total pagu pada Triwulan III Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **117,46%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan III Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Triwulan III Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)
2. IKS.06.08 Tingkat Operasional PPN Pengambengan (Nilai)
3. IKS.07.11 Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan
4. IKS.08.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengambengan (Persen)

Kemudian untuk indikator lainnya belum dinilai pada Triwulan III tahun 2023, antara lain :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBPN di PPN Pengambengan (Rp juta)
2. IKS.03.03 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
3. IKS.04.04 Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
4. IKS.04.05 Nelayan/awak kapal perikanan yang di tingkatkan pengetahuan /kompetensinya. (Orang)
5. IKS.05.06 Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)
6. IKS.05.07 Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)
7. IKS.06.09 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis penataannya (Lembaga)
8. IKS.06.10 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
9. IKS.08.12 Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)
10. IKS.08.14 Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
11. IKS.08.15 IP ASN PPN Pengambengan (Indeks)

12. IKS.08.16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengambengan (Persen)
13. IKS.08.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)
14. IKS.08.18 Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)
15. IKS.08.19 Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambengan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	5
E. SDM Aparatur PPN Pengembangan	6
F. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Pembangunan Nasional Visi Presiden.....	12
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi KKP	14
C. Pembangunan Perikanan Tangkap	16
D. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	27
E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
B. Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity). Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggungjawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi

pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengembangan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.
2. Fungsi perusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut :

1. Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Subkoordinatif Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Sub Koordinator Kelompok Kesyahbandaran, dipimpin oleh Subkoordinatif Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapar, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Sub Koordinator Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Subkoordinatif Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan

wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terdiri dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

E. SDM Aparatur PPN Pengambengan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan didukung oleh 68 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 34 orang, PPPK sebanyak 14 orang dan Pramubakti sebanyak 23 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan III Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-		1	1
2.	Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	-	2	8	-	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	2	-	-	2
4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	1	6	-	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok	-	1	3	-	4

	Kerja Kesyahbandaran					
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	3	-	3
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	14
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	-	-	23
Jumlah						71

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Triwulan III Tahun 2023 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Subbagian Umum	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	1	2	7	-	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	-	-	2
4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	1	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	-	2	5	-	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4

6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	3	-	3
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8	1	5	-	14
8.	Pegawai Pramubakti	16	1	6		23
Jumlah						71

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Triwulan III Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2.	Subbagian Umum	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Bagian Umum	2	8	10
3.	Sub Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	2
4.	Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	4	3	7
5.	Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	JFT/Pelaksana Sub Kelompok Kerja Kesyahbandaran	3	1	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	1	2	3

	Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	Perencana (Muda)	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	1	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9	5	14
8.	Pegawai Pramubakti	15	8	23
Jumlah				71

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan III Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan S/d Triwulan III Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) S/d Triwulan III Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Pengembangan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Triwulan III Tahun 2023.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan

antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, Analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Nasional Visi Presiden

Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2021-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

Misi Presiden

Misi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila\
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

Tujuan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2021-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan

yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2021-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
- b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan

2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati,
- b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- c. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni:

- a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong- Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap

yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.

2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan

yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan

(WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.

4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai berikut :

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengambengan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengambengan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Pengambangan Jembrana.
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengambangan Jembrana.
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengambangan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana.
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di

harapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut.

7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Jembrana melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jembrana sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengambengan Jembrana maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jembrana untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhannya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ketidakeimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain :

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan
 - a) Penerimaan PNBP di PPN Pengambengan (Rp. Juta)
 - Jumlah pemenuhan pelaporan PNBP di UPT PPN Pengambengan (dokumen).
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengambengan
 - a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengambengan (Ton)

- Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (dokumen)
3. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pengambangan
 - a) Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan (Produk)
 - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengambangan
 4. Pengelolaan awak kapal perikanan tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan
 - a) Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
 - Jumlah dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengambangan
 - b) Nelayan/awak kapal perikanan yang di tingkatkan pengetahuan/kompetensinya. (Orang)
 - Data nelayan/awak kapal perikanan yang telah menerima pelatihan sertifikasi awak kapal dan HAM Perikanan (Laporan)
 5. Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBPN Perikanan Tangkap yang Optimal di PPN Pengambangan
 - a) Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
 - Penjumlahan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang PNBPN perikanan tangkap di PPN Pengambangan
 - b) Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)
 - Penjumlahan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang PNBPN perikanan tangkap di PPN Pengambangan
 6. Pengelolaan PPN Pengambangan yang berdaya saing
 - a) Tingkat Operasional PPN Pengambangan (Persen)
 - Nilai Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
 - b) Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya

(Lembaga)

- c) Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
- Persentase pemenuhan informasi permodalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

7. Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggungjawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

- a) Laporan data log book penangkapan ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di PPN Pengambangan (Laporan)
- Validasi data log book penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (dokumen);

8. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

- a) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPN Pengambangan (Nilai)
- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Akuntabilitas
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil
- b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengambangan (Persen)
- Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengambangan

- c) Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
 - Nilai Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dari Unit Kerja.
- d) IP ASN PPN Pengembangan (indeks)
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai dari beberapa unsur berikut :
 - Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
 - Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)
- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)
 - Nilai dari kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- g) Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- h) Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)
 - Realisasi anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (%)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Targe t
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap	1	Penerimaan PNBPN di PPN Pengembangan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Juta	526,0 5

	Meningkat di PPN Pengambengan		(Rp juta)				
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	4800
3	Pengelolaan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di PPN Pengambengan	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Produk	50
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Pengambengan	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Produk	1
		5	Nelayan/awak kapal perikanan yang di tingkatkan pengetahuan /kompetensinya. (Orang)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Orang	30
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengambengan yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Unit	3

			(Unit)				
		7	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Unit	1
6	Pengelolaan PPN Pengambengan yang Berdaya Saing	8	Tingkat Operasional PPN Pengambengan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	83
		9	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Lembaga	2
		10	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Orang	48
7	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang bertanggungjawab di PPN Pengambengan	11	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Laporan	900

8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Laporan	45,10
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	75
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93
		15	IP ASN PPN Pengembangan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	82
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	77,5
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengembangan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	77,5

		(Persen)				
	18	Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	89
	19	Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	82

D. TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolok ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang di-cascading dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan	1	Penerimaan PNBPN di PPN Pengembangan (Rp juta)	-
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan	2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	2800
3	Pengelolaan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di PPN Pengembangan	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN	4	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-

	Pengembangan	5	Nelayan/awak kapal perikanan yang di tingkatkan pengetahuan /kompetensinya. (Orang)	-
5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	-
		7	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)	-
6	Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing	8	Tingkat Operasional PPN Pengembangan (Nilai)	82
		9	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	-
		10	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	-
7	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang bertanggungjawab di PPN Pengembangan	11	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan)	500
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	12	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)	-
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan (Persen)	75
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)	-
		15	IP ASN PPN Pengembangan (Indeks)	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengembangan	-

		(Persen)	
		17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)	-
		18 Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)	-
		19 Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambengan (Nilai)	-

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk Triwulan III Tahun 2023 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Triwulan III Tahun 2023

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 3		REALISASI TW 3		
			TARGET	% TARGET PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
		18.568.021.000	12.746.939.387	68,65%	11.910.036.408	93,43%	64,14%
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.808.222.000	5.036.622.543	64,50%	4.492.139.115	89,19%	57,53%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326.200.000	266.352.701	81,65%	168.357.948	63,21%	51,61%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	300.000.000	242.152.701	80,72%	145.157.948	59,94%	48,39%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	300.000.000	242.152.701	80,72%	145.157.948	59,94%	48,39%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.000.000	13.000.000	100,00%	12.000.000	92,31%	92,31%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	13.000.000	100,00%	12.000.000	92,31%	92,31%
2337.PCA	Perizinan Produk[Base Line]	13.200.000	11.200.000	84,85%	11.200.000	100,00%	84,85%
2337.PCA.001	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	13.200.000	11.200.000	84,85%	11.200.000	100,00%	84,85%

2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.415.702.000	4.712.529.842	63,55%	4.290.750.119	91,05%	57,86%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	3.903.252.000	2.759.313.223	70,69%	2.358.251.022	85,47%	60,42%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	2.944.857.000	2.161.923.223	73,41%	1.772.356.022	81,98%	60,18%
2338.BGA.004	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	958.395.000	597.390.000	62,33%	585.895.000	98,08%	61,13%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	717.800.000	711.677.000	99,15%	167.605.900	23,55%	23,35%
2338.RAL.001	Sarana pelabuhan perikanan mendukung pelaksanaan PIT dan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	717.800.000	711.677.000	99,15%	167.605.900	23,55%	23,35%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	2.794.650.000	1.953.216.619	69,89%	1.764.893.197	90,36%	63,15%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	2.594.650.000	1.852.561.798	71,40%	1.721.110.349	92,90%	66,33%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan	200.000.000	100.654.821	50,33%	43.782.848	43,50%	21,89%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	5.920.000	74,00%	4.800.000	81,08%	60,00%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	5.920.000	74,00%	4.800.000	81,08%	60,00%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	5.920.000	74,00%	4.800.000	81,08%	60,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	58.320.000	51.820.000	88,85%	28.231.048	54,48%	48,41%

2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	58.320.000	51.820.000	88,85%	28.231.048	54,48%	48,41%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	58.320.000	51.820.000	88,85%	28.231.048	54,48%	48,41%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.759.799.000	7.710.316.844	71,66%	7.417.897.293	96,21%	68,94%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.759.799.000	7.710.316.844	71,66%	7.417.897.293	96,21%	68,94%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	50.000.000	49.999.100	100,00%	1.624.959.445	3249,98%	3249,92%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50.000.000	49.999.100	100,00%	48.199.100	96,40%	96,40%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	10.293.659.000	7.352.928.441	71,43%	7.070.447.302	96,16%	68,69%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	32.100.000	94,41%	6.244.500	19,45%	18,37%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	18.000.000	16.000.000	88,89%	-	0,00%	0,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.241.659.000	7.304.828.441	71,32%	7.064.202.802	96,71%	68,98%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	125.000.000	121.659.480	97,33%	121.659.480	100,00%	97,33%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125.000.000	121.659.480	97,33%	121.659.480	100,00%	97,33%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	52.000.000	41.010.000	78,87%	31.041.097	75,69%	59,69%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	52.000.000	41.010.000	78,87%	31.041.097	75,69%	59,69%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	144.719.823	60,52%	146.550.314	101,26%	61,28%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	20.000.000	33,33%	44.421.339	222,11%	74,04%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000	22.714.000	58,24%	15.166.316	66,77%	38,89%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	140.140.000	102.005.823	72,79%	86.962.659	85,25%	62,05%

E. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU *Perspektif Internal Process dan Learning and Growth* yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di dapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran di bawah ini, sebagai berikut ini :

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2023

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Polar isasi	Perhit ungan	Target	Target	Capaian	%
					2023	SEPT EMBE R	SEP TEM BER	
S.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengambengan						120	
IKS .1	Penerimaan PNBP di PPN Pengambengan (Rp juta)	Juta	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	526,05	0		
IKS .2	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)	Ton	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	4.800, 00	2.800, 00	4.004,00	120
	Data Dukung 1							
S.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengambengan							
S.03	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pengambengan							
IKS .03 .1	Dokumen Kapal Perikanan yang diterbitkan	Produk	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	50	0		

		(Produk)							
S.04	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan								
IKS .04 .1	Dokumen Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan (Produk)	Produk	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			
IKS .04 .2	Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang ditingkatkan Fasilitasnya untuk Mendukung Penerapan Ikan Terukur (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30	0			
S.05	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pengembangan yang Optimal								
IKS .05 .1	Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	0			
IKS .05 .2	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0			

		dikembangkan (Unit)							
S.06	Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing							109,85	
IKS .06 .1	Tingkat Operasional PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	83	82	90,08	109 ,85	
	Data Dukung1								
IKS .06 .2	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)	Lemba ga	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	2	0			
IKS .06 .3	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	Orang	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	48	0			
S.07	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang Bertanggungjawab di PPN Pengembangan							120	
IKS .07 .1	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan (Laporan)	Lapora n	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	900	500	667	120	
	Data Dukung1								
S.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan							120	
IKS .08 .1	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas	Nilai	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	45,1	0			

		menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)							
	IKS .08 .2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan (Persen) Data Dukung1	Persen	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	75	75	100	120
	IKS .08 .3	Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	93	0		
	IKS .08 .4	IP ASN PPN Pengembangan (Indeks)	Indeks	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	82	0		
	IKS .08 .5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	77,5	0		
	IKS .08 .6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	77,5	0		

IKS .08 .7	Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	89	0		
IKS .08 .8	Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maxi mize	Nilai Posisi Akhir	82	0		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan III Tahun 2023 diukur melalui 19 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambangan

IKU 1 – Penerimaan PNBPN di PPN Pengambangan (Rp juta)

Indikator Nilai PNBPN merupakan indikator pendapatan negara bukan pajak pada UPT PPN Pengambangan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBPN yang dikelola oleh PPN Pengambangan berupa PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA (tambat labuh) dan non SDA (imbal jasa UPT PPN Pengambangan). Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 526,05 juta rupiah dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

Sasaran Strategis 2

Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambangan

IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambangan (Ton)

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengambangan dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Volume produksi s/d Triwulan III Tahun 2023 adalah sebanyak 4004 Ton atau 120% dari target Triwulan III Tahun 2023 sebesar 2800 Ton. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan							
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan							
Tahun 2022		Tahun 2023			% Capaian Terhadap			Renstra 2020-2024	
Target TW III	Realisasi TW III	Target Tahun 2023	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW III 2023	Target Tahun 2023	Realisasi TW III 2022	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
8100	9666	4800	2800	4004	120	83,41	41,42	14400	19,44

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton) memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target triwulan III yaitu 2800 ton sedangkan realisasi sebesar 4004 ton. Target jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan dapat tercapai karena faktor antara lain :

Rata-rata kontribusi penangkapan di perairan umum memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penangkapan di perairan umum cukup baik dan akan semakin berkontribusi terhadap total volume jika pengelolaan perikanan di perairan umum lebih diperhatikan (termasuk kelembagaan dan sistem pencatatan data hasil tangkapan). Produksi perikanan tangkap dominan di Pelabuhan adalah lemuru, tongkol, layang, tembang.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebanyak 9666 ton mencapai target sebesar 119,33% dari target triwulan III sebesar 8100 ton. Persentase Triwulan III Tahun 2023 lebih rendah dari prosentase capaian Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar 41,42%

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator tahun menengah

Berdasarkan data tersebut, indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan triwulan III tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 19,44%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
4004	15406	25,98

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan hanya mencapai 25,98%. Hal ini disebabkan karena perbedaan target produksi yang cukup jauh di mana PPN Prigi mempunyai target tahunan yaitu sebesar 13000 ton di tahun 2023 ini, dibandingkan PPN Pengambangan yang menargetkan 4800 ton.

e Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di PPN Pengambangan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator Kinerja Utama baru, namun sebelumnya terdapat Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Indikator ini dapat memenuhi target jumlah produksi apabila jumlah tangkapan melebihi target di tahun 2021. Jika dibandingkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan III Tahun 2023 dengan Triwulan III Tahun 2022 ini mengalami penurunan yang disebabkan awal tahun 2023 cuaca buruk dan kondisi perairan yang tidak mendukung untuk dilakukan penangkapan ikan serta jumlah kapal yang melakukan bongkar muat ikan mengalami penurunan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 11. Realisasi anggaran mendukung IKU

Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Target (%)
629.665.000,00	478.721.423,00	76,03%

Realisasi anggaran Triwulan III 2023 untuk mendukung tercapainya IKU Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2023 mencapai 76,03%.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan hasil perhitungan gabungan dari jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di PPN Pengambengan Jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Pengambengan (ton) Triwulan III Tahun 2023 dibanding Triwulan III Tahun 2022 mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan awal tahun 2023 mengalami cuaca buruk dan kondisi perairan yang tidak mendukung untuk dilakukan penangkapan ikan serta jumlah kapal yang melakukan bongkar muat ikan mengalami peningkatan. Upaya – upaya yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan meningkatkan keahlian nelayan, Sosialisasi tentang Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan. Pelaksanaan IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Pengambengan Triwulan III tahun 2023 ini di dukung oleh anggaran kegiatan penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi dan analisis.

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di PPN Pengambangan

IKU-03 : Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)

Indikator ini merupakan laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, antara lain Sertifikat Kelaiakan Kapal Perikanan (SKKP). Sertifikat Kelaiakan Kapal Perikanan atau disingkat adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk Keselamatan pelayaran. PPN Pengambangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melayani pengurusan SKPP.

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 50 produk dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

Sasaran Strategis 4

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan Tersertifikasi/ Terlindungi di PPN Pengambangan

IKU-04 Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)

Merupakan indikator yang ditunjukkan dengan adanya pelatihan bagi awak kapal perikanan sebanyak 1 produk. Target indikator ini pada tahun 2023 diukur dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-05 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan /kompetensinya. (Orang)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah awak kapal yang telah memperoleh pelatihan, bimtek atau sertifikasi mengenai awak kapal perikanan antara sertifikasi awak kapal perikanan dan sertifikasi HAM ABK kapal Perikanan yang diharapkan awak kapal perikanan/nelayan dapat bekerja sesuai keahlian penangkapan ikan dan mengerti terkait HAM awak kapal yang berada di kapal perikanan. Pengukuran dan pelaporan Indikator ini setiap triwulan. IKU Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan berdasarkan keahlian dan ketrampilan di

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 ini didukung oleh anggaran kegiatan bimbingan teknis SKPI bagi awak kapal perikanan.

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 1 produk dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya

Sasaran Strategis 5

Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengambangan yang optimal

IKU-06 Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)

IKU Jumlah Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasillitasnya untuk menunjang Penangkapan Ikan Terukur Perikanan tangkap merupakan kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan dengan memperhatikan kualitas waktu, mutu dan biaya.

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 3 unit diukur dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-07 Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)

Indikator ini menghitung jumlah pengembangan yang berwawasan lingkungan dilihat dari adanya fasilitas yang dikembangkan dan ditingkatkan, yang dihitung dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya dengan target sebesar 1 unit.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan PPN Pengambangan yang Berdaya Saing

IKU-08 Tingkat Operasional PPN Pengambangan

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Perhitungan indikator ini ditinjau dari evaluasi kinerja pelabuhan perikanan yang di nilai oleh eselon I (DJPT) meliputi operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, Coldstorage, Ice Crusher Machine, Docking/Slipway,

pemakaian peralatan TPI, penyaluran air ke kapal, penyaluran air bersih, penyaluran es, penyaluran BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin, jumlah kapal yang mendaratkan ikan yang diterbitkan setiap bulan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan meliputi : operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, cold storage, ice crusher machine, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air bersih, es, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, jumlah kapal hasil yang di inspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan prosentase pencapaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan.

Sasaran Kegiatan – 6		<i>Pengelolaan PPN Pengambangan yang Berdaya Saing</i>							
Indikator Kinerja – 8		Tingkat Operasional PPN Pengambangan							
Tahun 2022		Tahun 2023			% Capaian Terhadap			Renstra 2020-2024	
Target TW III	Realisasi TW III	Target Tahun 2023	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW III 2023	Target Tahun 2023	Realisasi TW III 2022	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
81	92,94	83	82	90,08	109,85	0,40	96,92	84	110,64

a) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target triwulan III yaitu 82 ton sedangkan realisasi sebesar 90,08 ton atau sebesar 109,85 persen.

b) Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebanyak 92,94 ton mencapai target sebesar 114,74% dari target triwulan III sebesar 81 ton. Persentase Triwulan III Tahun 2023 lebih rendah dari prosentase capaian Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar 109,85%

c) Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator RENSTRA

Berdasarkan data tersebut, indikator tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan triwulan III tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 110,64%.

d) Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
90,08	93,33	96,51

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan hanya mencapai 96,51%. Hal ini disebabkan karena perbedaan hasil tangkapan yang cukup jauh di mana PPN Prigi mendapatkan hasil tangkapan 15406 ton, dibandingkan PPN Pengambangan dengan hasil tangkapan 4004 ton.

e) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dapat dilihat dari nilai EVKIN Triwulan III Tahun 2023 yaitu 90,08. Nilai ini didukung oleh Pelayanan Kesyahbandaran, Inspeksi Pembongkaran Ikan, Penyediaan Data Perikanan Tangkap, Tingkat Pelayanan Usaha Pengguna Jasa yang terstandarisasi, Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 15. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU

Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Target (%)
527.840.000,00	307.277.104,00	58,21%

Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2023 mencapai 58,21%.

f) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Perhitungan dari indikator ini adalah Rata – rata dari Capaian kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan

sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap bulannya.

IKU-09 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya (Lembaga)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lokasi yang dilakukan pendataan produksi ikan di Pelabuhan Perikanan termasuk lokasi binaanyang dihitung dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya dengan target sebesar 2 lembaga.

IKU-10 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)

Indikator Tingkat Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan kegiatan konsultasi *stakeholder* dengan petugas layanan terkait kredit perikanan di pojok pendanaan.

Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 48 orang dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

Sasaran Strategis 7

Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang bertanggungjawab di PPN Pengembangan

IKU-11 Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan)

Sasaran Kegiatan – 6		Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI Perairan Laut yang bertanggungjawab di PPN Pengembangan							
Indikator Kinerja – 11		Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan							
Tahun 2022		Tahun 2023			% Capaian Terhadap			Renstra 2020-2024	
Target TW III	Realisasi TW III	Target Tahun 2023	Target TW III	Realisasi TW III	Target TW III 2023	Target Tahun 2023	Realisasi TW III 2022	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
600	685	900	500	677	120	0,40	98,83	900	76,11

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target triwulan III yaitu 677 ton sedangkan realisasi sebesar 500 ton atau sebesar 120 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebanyak 685 mencapai target sebesar 114,17% dari target triwulan III sebesar 600 ton. Persentase Triwulan III Tahun 2023 lebih tinggi dari prosentase capaian Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar 120%

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator RENSTRA

Berdasarkan data tersebut, indikator Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan triwulan III tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 76,11%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
677	84	805

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 805%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan dalam memenuhi target jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan dapat dilihat dari :

- Dari total kapal kurang lebih 108 unit yang berpangkalan di PPN Pengambengan hanya 2 kapal yang menerapkan logbook penangkapan ikan di karenakan kapal belum memiliki izin karena masalah alat tangkap pukat cincin pelagis kecil 2 kapal yang harus di akumulasi GT kapal di Permen KP no 18 Tahun 2016 sehingga masih terkendala izinnya
- Nakhoda kapal pukat cincin pelagis kecil 2 kapal belum memahami penggunaan aplikasi e-logbook dengan baik karena masih kapal tradisional sehingga perlunya

- pendampingan yang intensif
- HP nakhoda mempunyai spesifikasi di bawah rata rata sehingga aplikasi belum mampu dan sering terkendala
 - Sosialisasi kembali terkait migrasi aplikasi dari elogbook penangkapan ikan menjadi E PIT

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 19. Realisasi anggaran mendukung IKU

Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Target (%)
51.820.000,00	15.701.048,00	30,30%

Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan jika dibandingkan dengan target anggaran tahun 2023 mencapai 30,30%.

h. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai PNBPN merupakan indikator pendapatan negara bukan pajak pada UPT PPN Pengambangan yang dicapai tahun berjalan dalam sektor Perikanan Tangkap. PNBPN yang dikelola oleh PPN Pengambangan berupa PNBPN yang berasal dari Sumber Daya Alam/SDA (tambat labuh) dan non SDA (imbil jasa UPT PPN Pengambangan).

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang telah menerapkan logbook penangkapan ikan dan telah diverifikasi oleh petugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang ditandai dengan diterbitkannya buku kapal perikanan. Log book penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. Log book merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan nakhoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan (hasil tangkapan) di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikannya.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan tahun berjalan dengan menghitung jumlah kapal perikanan yang tervalidasi data log book penangkapan ikan

pada SILOPI – DSS dan dilaporkan hasil analisis data log booknya berupa data CPUE tahunan dan analisisnya pada akhir tahun. Validasi data log book penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48 tahun 2014 tentang logbook penangkapan ikan di mana data yang diserahkan adalah lengkap dan benar, yaitu adanya kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan dan kesesuaian antara periode waktu operasi penangkapan ikan dengan jumlah hasil tangkapan.

Penghitungan :

$$\Sigma \text{Kapal} = \text{Kapal}_1 + \text{Kapal}_2 + \dots + \text{Kapal}_n$$

Kapal1 = Kapal perikanan yang melaporkan data log book penangkapan ikan dan dimasukkan pada aplikasi SILOPI – DSS Indikator ini ditargetkan serta dilaporkan setiap triwulan.

Tercapainya jumlah kapal yang menerapkan log book penangkapan ikan melalui sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terhadap Nelayan, nakhoda dan pelaku usaha di pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan membuat pencatatan dan pelaporan data Log book melalui Aplikasi E-Logbook yang user friendly, menjadikan Logbook menjadi prasyarat perpanjangan izin, pengembangan aplikasi verifikasi/validasi data logbook penangkapan ikan sebagai salah satu cara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan secara tepat dan akurat berupa Surat Klarifikasi terkait ketidakpatuhan dalam menerapkan Logbook, dan kegiatan peningkatan kapasitas SDP Petugas Pencatatan di Pelabuhan Perikanan. merupakan salah satu keberhasilan pencapaian IKU jumlah kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan. Log book menjadi prasyarat perpanjangan izin, pengembangan e-logbook dan verifikasi/validasi melalui aplikasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung IKU ini, antara lain:

- Pengumpulan data logbook penangkapan ikan melalui aplikasi SILOPI – DSS;
- Supervisi dan koordinasi pengumpulan data logbook penangkapan ikan;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Analisis Log Book;
- Pengolahan dan analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Sasaran Strategis 8

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan

IKU-12 Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (2) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Pengembangan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Penilai Internal (TPI)

Target indikator ini pada tahun 2023 pemilaian 45,01 dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU 13 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan (Persen)

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan II Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Sasaran Kegiatan – 8		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan							
Indikator Kinerja – 13		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan							
Tahun 2022		Tahun 2023			% Capaian Terhadap			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	%

TW III	TW III	Tahun 2023	TW III	TW III	TW III 2023	Tahun 2023	TW III 2022	2024	Realisasi thd Target Renstra
0	0	75	75	100	120	120	0	0	0

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengambengan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target triwulan III yaitu 100 ton sedangkan realisasi sebesar 75 ton atau sebesar 120 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator sampai dengan triwulan III Tahun 2022 dengan Triwulan III Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap indikator RENSTRA

Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengambengan triwulan III tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 0%.

a. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	0

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan memiliki capaian yang sama sehingga tidak dapat dibandingkan.

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator ini akan tercapai apabila Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti oleh PPN Pengambengan.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 23. Realisasi anggaran mendukung IKU

Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase thd Target (%)
-	-	-

Realisasi anggaran Triwulan III 2023 untuk mendukung tercapainya IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan tidak dapat dibandingkan dengan target anggaran Tahun 2023.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa tindak lanjut program pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap dan merupakan kegiatan penunjang untuk tercapai IKU.

IKU-14 Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 93 dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-15 IP ASN PPN Pengembangan (Indeks)

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 82 dengan periode pengukuran semester sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengembangan (Persen)

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan

menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Dalam proses pengadaan mengacu pada RUP (Rencana umum pengadaan) yang telah disusun. Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 77,5 dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)

Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 77,5 dengan periode pengukuran tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-18 Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Satker dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus

Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 89 dengan periode pengukuran semester sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

IKU-19 Nilai kinerja anggaran (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Target indikator ini pada tahun 2023 penilaian 82 dengan periode pengukuran semester sehingga pada Triwulan III belum dapat diukur capaian dan realisasinya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Triwulan III Tahun 2023 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar **18.125.313.000,-** yang diperoleh

untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 32. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Triwulan II TA 2023

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 3	
			TARGET	% TARGET PAGU
		18.568.021.000	12.746.939.387	68,65%
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.808.222.000	5.036.622.543	64,50%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326.200.000	266.352.701	81,65%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	7.415.702.000	4.712.529.842	63,55%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	5.920.000	74,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	58.320.000	51.820.000	88,85%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.759.799.000	7.710.316.844	71,66%

2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.759.799.000	7.710.316.844	71,66%
------	--	----------------	---------------	--------

Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2023 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah menargetkan sebesar 12.746.939.387,- yang terealisasi sebesar Rp. 11.910.036.408,- atau 93,14% dari total pagu pada Triwulan 3 Tahun 2023.

Tabel 33. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Triwulan III Tahun 2023

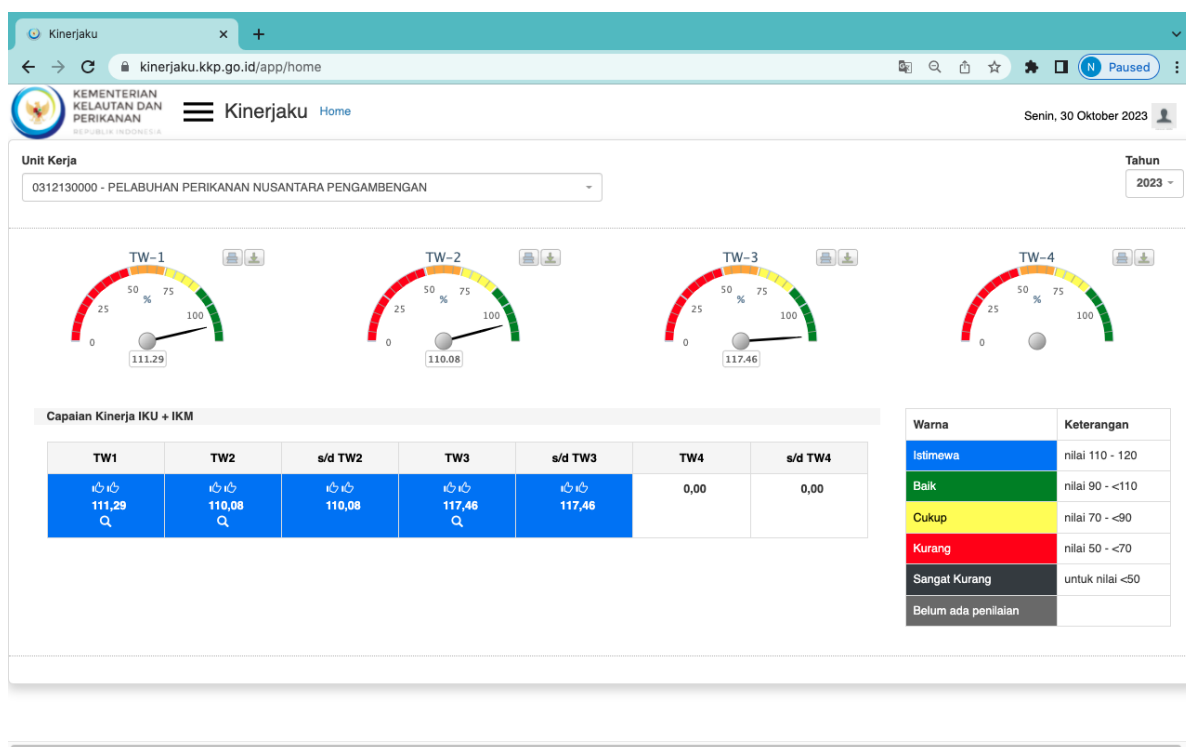
KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TW 3		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
		18.568.021.000	11.910.036.408	93,43%	64,14%
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.808.222.000	4.492.139.115	89,19%	57,53%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	326.200.000	168.357.948	63,21%	51,61%
2338	Pengelolaan Pelabuhan	7.415.702.000	4.290.750.119	91,05%	57,86%

	Perikanan				
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	4.800.000	81,08%	60,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	58.320.000	28.231.048	54,48%	48,41%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.759.799.000	7.417.897.293	96,21%	68,94%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.759.799.000	7.417.897.293	96,21%	68,94%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Triwulan III Tahun 2023 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp. 12.746.939.387,- yang terealisasi sebesar Rp 11.910.036.408,- atau 93,43% dari total pagu pada Triwulan III Tahun 2023. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **117,46%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Triwulan III Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan s/d Triwulan III Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)
2. IKS.06.08 Tingkat Operasional PPN Pengambengan (Nilai)
3. IKS.07.11 Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan (Laporan
4. IKS.08.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengambengan (Persen)

Kemudian untuk indikator lainnya belum dinilai pada Triwulan III tahun 2023, antara lain :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP di PPN Pengambengan (Rp juta)
2. IKS.03.03 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
3. IKS.04.04 Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)
4. IKS.04.05 Nelayan/awak kapal perikanan yang di tingkatkan pengetahuan /kompetensinya. (Orang)
5. IKS.05.06 Pelabuhan perikanan yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur (Unit)
6. IKS.05.07 Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan (Unit)
7. IKS.06.09 Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis penataannya (Lembaga)
8. IKS.06.10 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)
9. IKS.08.12 Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)
10. IKS.08.14 Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
11. IKS.08.15 IP ASN PPN Pengambengan (Indeks)
12. IKS.08.16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pengambengan (Persen)

13. IKS.08.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)
14. IKS.08.18 Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)
15. IKS.08.19 Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambengan (Nilai)

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan segala potensi-potensi SDM serta sarana prasarana yang telah dimiliki untuk mencapai target yang ditentukan.
- b) Memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk mencapai output sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Triwulan III Tahun 2023 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.